

Tindak Lanjuti Unras PMII DPRD Mamuju Tengah Panggil Kadis PMD Dan APDESI

Rosmini - MAMUJUTENGAH.BERSUARA.ID

Oct 13, 2022 - 19:19



Mamuju Tengah - Menindak lanjuti Aksi Unjuk Rasa (Unras) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang mamuju Tengah terkait tuntutan yang dilayangkan terhadap Dinas PMD berapa hari yang lalu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kadis PMD Dzulkifli dengan Perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Mamuju Tengah diruang Komisi I, Kamis 13/10/2022.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II Fathahuddin Al Gafiqhi didampingi anggota DPRD Abdillah Adhin, Herlina, Marsudi dan Sekretaris Dawan Mahyuddin S.Ag, M.Pd

Fathahuddin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Mahasiswa sudah melakukan kontrol terhadap kinerja Pemerintah tentu ini akan menjadi hal yang baik bagi kami kedepannya.

“Kami Lembaga DPRD terbuka bagi siapa saja yang ingin membuat kritik membangun terhadap kita karena itu meman perangnya Masyarakat, “ucapnya.

Lanjut ia mengatakan Kami sudah melakukan audiens Rapat Dengar Pendapat (RDP),kami undang dinas terkait seperti PMD dan Kepala Desa kami tuntaskan semua hari ini.

Ditempat yang sama Kadis PMD Dzulkifli Menuturkan bahwa dirinya tidak anti kritik, melainkan ini menjadi cambuk untuk berbuat lebih baik kedepan.

“Ini Demokrasi, bebas untuk menyampaikan pendapat, ini sah-sah saja, kami tidak anti kritik namun ini menjadi momen kami untuk mengevaluasi diri,” Tuturnya.

Lanjut ia mengatakan bahwa tidak mungkin ada aksi dari teman-teman PMII jika memang tidak ada masalah yang harus dibenahi.Terkait intervensi program Desa itu hal yang wajar karena Dinas PMD merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

“Intervensi itu pastilah, karena ada program Nasional dan arah pembangunan Pemda Mamuju Tengah , tetapi terkait hal-hal yang lain kami tidak boleh mengintervensi, itu hak masing-masing Desa,” jelasnya.

Ia mengharapkan agar kedepannya Dinas PMD Mamuju Tengah mampu berbuat yang lebih baik dan mampu mengevaluasi diri.

Sementara Plt. Ketua DPD APDESI Mamuju Tengah Alimuddin S.Sos Menyikapi tuntutan massa aksi PMII dugaan adanya program titipan di Desa dan anggaran dana BUMDes.

Seharusnya mahasiswa, ketika hendak melaksanakan aksi demosterasi harus menyampaikan sesuai data.

“Apa yang menjadi tuntutan Mahasiswa sama sekali tidak ada yang terjadi di Desa dan sama sekali tidak benar, “ Tegas Alimuddin.

Lanjut ia menambahkan makanya Kami Dari Pemerintah Desa membuat Petisi dan tidak setuju dengan tuntutan yang yang dilakukan oleh PMII Mamuju Tengah.

“Kami juga butuh kritikan sebab dalam membangun tidak cukup dengan Pemerintah Desa, namun membutuhkan semua pihak agar lebih maju, “ Tutupnya.